

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terdapat permasalahan dimana lembaga koperasi kurang menyajikan perhatian yang memadai terhadap konsep Good Corporate Governance. Untuk memastikan koperasi dinilai sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan adil), pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/KSPPS didorong untuk menyelenggarakan usaha simpan pinjam. kegiatan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip koperasi dan prinsip kehati-hatian.

Sebagai tumpuan perekonomian nasional, koperasi Indonesia perlu dikembangkan secara bertanggung jawab. Koperasi sangat penting bagi masyarakat dikarenakan bisa memaksimalkan pemberdayaan sektor ekonomi, khususnya bagi individu yang bergabung menjadi anggota. Untuk itu, pemerintah hadir untuk menciptakan lingkungan yang memihak kepada koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25. Koperasi harus diberikan kewenangan untuk berorganisasi secara internal sesuai dengan pilihan yang diambil pada Rapat Anggota pada rangka melangsungkan tugasnya. yang dilaksanakan pemerintah. Kombinasi tugas-tugas fungsional ini diharapkan memungkinkan koperasi untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sejalan dengan identitas dan cita-cita yang diakui secara universal, yang akan memungkinkan koperasi untuk bertahan sepanjang waktu.

Penopang perekonomian negara ialah sektor koperasi yang saling menunjang dengan sektor lain seperti BUMN dan BUMS. Koperasi melangsungkan peran sebagai pilar yang kuat dan tegak. Koperasi dihadirkan sebagai institusi, sebagai sistem nilai, dan sebagai metode ataupun prosedur. Menurut informasi Kementerian KUKM, koperasi kesulitan membuktikan kelayakannya.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwasannya pengetahuan koperasi pada mendirikan koperasi juga sangat rendah, dan ketidakaktifan koperasi relatif tinggi.

Salah satu komponen terpenting pada memaksimalkan efisiensi ekonomi ialah tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yang mencakup sejumlah interaksi antara pemilik modal, pengelola koperasi, pengurus koperasi, pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, tujuan koperasi dan strategi pemantauan kerja bisa dengan mudah ditentukan dengan bantuan kerangka tata kelola perusahaan yang dirancang dengan baik. (Darmawati & rekan, 2004). Transparansi ialah salah satu prinsip GCG, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006). (transparansi), akuntabilitas (responsibility), kemandirian (independence), tanggung jawab (responsibility), dan keadilan (equality and justice).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) menyatakan bahwasannya sebuah perusahaan harus berpegang pada prinsip-prinsip GCG untuk menjamin keberlanjutan perusahaan lewat perhatian pemangku kepentingan. Guna menjamin pengelolaan koperasi terlaksana secara efektif, efisien, dan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah aktif melangsungkan edukasi kepada masyarakat mengenai GCG di koperasi. Sistem GCG yang efektif mampu

berdampak pada profitabilitas perusahaan (Bistrova dan Lace, 2012). Saat memeriksa kinerja keuangan organisasi perusahaan, profitabilitas ialah metrik yang cocok untuk digunakan. Salah satu indikator kinerja keuangan koperasi ialah return on assets. Return on Asset (ROA) ialah ukuran kemampuan perusahaan pada menghasilkan keuntungan dari aktivitasnya (Sudiyatno dan Suroso, 2010). Keadaan koperasi diharapkan bisa membaik dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Saat ini terdapat beberapa permasalahan pada pengawasan koperasi, khususnya terhadap koperasi yang melangsungkan usaha simpan pinjam. Yang utama tercantum di bawah ini.

1. Peraturan terkait pengawasan belum terinternalisasi secara memadai dan berkesinambungan.
2. Tidak terdapat satupun organisasi yang berperan sebagai “menteri” pada domain pengawasan.
3. Terdapat kerancuan mengenai hubungan kekuasaan antara wakil yang membawahi dan wakil yang menerbitkan badan hukum koperasi (BH).
4. Baik di pusat ataupun di daerah tidak terdapat pejabat pemerintah yang ditunjuk sebagai staf fungsional yang ditugaskan sebagai pengawas.
5. Pengertian, komponen, dan luasnya pengawasan belum semuanya dimaknai sama.

2. Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang yang sudah diuraikan diatas, bisa diidentifikasi masalah yang terjadi pada usaha koperasi sebagai sebuah badan usaha yang harus dijiwai empat pilar governansi korporat ini di atas. Sebagai badan usaha yang mengelola dana masyarakat, Untuk meraih penciptaan nilai perusahaan yang berkelanjutan pada jangka panjang, koperasi diharapkan mengimplementasikan tata kelola perusahaan berstandar global dan mempunyai ketentuan dan regulasi internal koperasi untuk melindungi kepentingan kreditur, debitur, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar lebih perhatian dan lebih fokus pada kajian, maka penelitian ini membatasi pada persoalan penerapan ataupun implementasi GCG pada prinsip-prinsip PUG-KI pada usaha koperasi sesuai dengan pertaturan internal koperasi dan juga pengawasan terhadap usaha koperasi

menurut asas GCG yang tercantum pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang di keluarkan oleh KNKG pada 2021, yakni transparansi, akuntabilitas, responsive, independensi dan fairness sebagai faktor yang paling menentukan keberhasilan usaha koperasi.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang, Batasan masalah ini di atas, penelitian ini di harapkan bisa menjawab pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tatakelola pengawasan Internal yang dilaksanakan oleh badan Pengurus Koperasi Pintu Air?
2. Bagaimanakah Penerapan Governansi Koperasi Pintu Air menurut prinsip-prinsip perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan sebagai unsur pokok GCG.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum

Tujuan umum dari kajian ini ialah untuk memahami tatakelola pengawasan Internal dan penerapan Governansi Koperasi menurut Prinsip-Prinsip Perilaku beretika, Tranparansi, Akuntabilitas sebagai unsur pokok Good Corporate Governance (GCG).

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dengan terdapatnya penelitian ini dan apabila tujuan penelitian ini tercapai diharapkan bisa bermanfaat sebagai referensi untuk memaksimalkan pemahaman khususnya mengenai teori dan aplikasi prinsip-Prinsip GCG dan praktik terbaik (best practices) governansi korporasi.

b. Manfaat Praktis

Jika tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan bisa berguna secara praktis sebagai masukan bagi usaha koperasi umumnya, khususnya koperasi Pintu Air sebagai subjek penelitian pada menghadapi persoalan tatakelola dan penerapan good corporation governance yang sesuai dengan PUGKI khusus Koperasi.

1.5. Definisi Istilah

Definisi operasional variabel penelitian GCG adalah, secara umum “tata kelola perusahaan yang baik” dipahami sebagai “tata kelola perusahaan pada arti yang terbaik”. Jika perusahaan menjunjung tinggi prinsip moral, tidak terdapat korupsi, laporan keuangan lebih baik, dan pengelolaan laba transparan, maka penerapan GCG bisa efektif. Manajemen laba, menurut Healy dan Wahlen (1999), ialah proses dimana manajer melangsungkan transaksi yang mengubah

pelaporan keuangan untuk menipu pemangku kepentingan dan mengimplementasikan penilaian terhadap laporan keuangan.